



7 DAERAH RAIH OPINI WTP
Tujuh daerah di Kalbar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kalbar. Siapa saja?
➔ **HAL. 10, 11, 12, 14**

TRIBUN PONTIANAK/ANESHVIDUKA

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat



TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUIKA
PEMERIKSAAN KEUANGAN - Sembilan kepada daerah menerima hasil pemeriksaan keuangan yang disampaikan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Idar Sundari, Selasa (6/6). Kota Pontianak, Kubu Raya. Sanggau, Ketapang, Sekadau, Sintang dan Mempawah meraih WTP sedangkan Sambas dan Kapuas Hulu meraih WDP.



Pemkot Enam Kali Raih WTP

Tujuh Daerah WTP dan Dua WDP

PONTIANAK, TRIBUN
 Tujuh entitas atau kabupaten/kota di Kalbar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP. Sementara dua daerah merah predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalbar Ida Sundari mengungkapkan, tujuh daerah meraih WTP 7 berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan 2016 yakni Kota Pontianak, Kubu Raya, anggau, Ketapang, Seadau, Sintang dan Mempawah.

Khusus Mempawah mengalami peningkatan dari sebelumnya WDP menjadi WTP. Sementara opini WDP diraih Sambas dan Kapuas Hulu.

"Pencapaian opini WTP

Sekalipun Kota Pontianak sudah enak kalau WTP, tetap saja masih ada beberapa temuan, tapi sifatnya administratif tidak berupa kerugian meterial

Sutarmidji
 Wali Kota Pontianak

bukan berarti tidak ada permasalahan dalam pengelolaan laporan keuangannya. Pengelolaan aset di beberapa Pemda belum memadai dan masih terdapat kesalahan dalam penganggaran walaupun nilainya masih di bawah batas nilai materialitas yang ditentukan," jelas Ida Sundari.

Untuk entitas yang mendapatkan WDP, lanjutnya, masalah pokok yakni pengelolaan aset daerah, di antaranya aset tetap. Aset yang pencatatannya digabungkan pada saat perolehannya untuk beberapa item aset.

Kota Pontianak menjadi daerah yang enam kali berturut-turut meraih

WTP. Wali Kota Pontianak Sutarmidji menuturkan, WTP sebetulnya menjadi keharusan bagi pemerintah dalam semua jenjang.

WTP, jelasnya, bukti pemerintah telah melakukan tata kelola pemerintahan secara benar khususnya tata kelola keuangan daerah.

Untuk meraih WTP, katanya, semua variabel sudah ada dan dilakukan oleh semua pemerintah. "Sudah ada variabelnya dan itu bisa dilakukan oleh pemerintah manapun karena variabel itu adalah hal yang harus dilakukan oleh pemerintah," jelasnya.

Ia menyebutkan, beberapa variabel yang harus dipenuhi seperti kepatuhan SAP, sistem pengendalian internal, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

"Sekalipun Kota Pontianak sudah enak kalau WTP, tetap saja masih ada beberapa temuan, tapi sifatnya administratif tidak berupa kerugian meterial. Pada penafsiran suatu aturan dan adanya yang tidak berpedoman pada aturan," ucapnya.

Temuan lainnya yakni warisan piutang PBB yang cukup merepotkan Pemkot Pontianak. "Itu yang repot dan jumlah piutang PBB yang diserahkan senilai Rp 60 miliar lebih dengan hampir 200 ribu SPPT," pungkasnya.

(zul/oni)